

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV. 1 Provinsi Riau

Nama Riau berasal dari beberapa penafsiran yaitu pertama berasal dari penamaan orang Portugis dengan kata “rio” yang berarti sungai, kedua berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab *Alfu Laila Wa Laila* (Seribu Satu Malam) yang menyebut “riahi” yang berarti air atau laut, ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat yang diangkat dari kata “rioh” atau “riuh” yang berarti ramai/hiruk pikuk orang bekerja. Nama ini kemungkinan mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.

Provinsi Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau disusun melalui Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun sejak 17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958.

IV. 1.1 Aspek Geografi

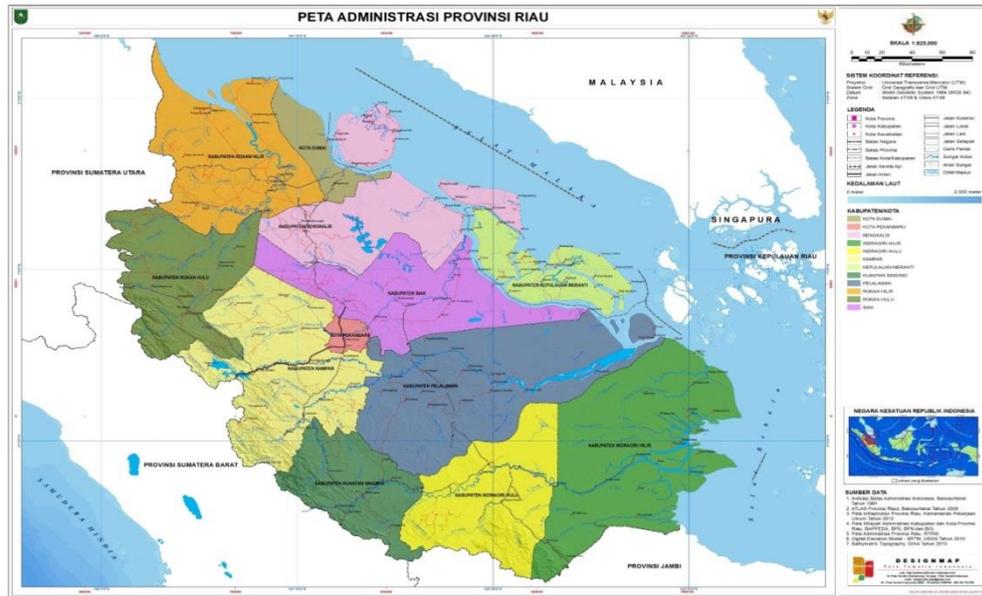
IV. 1.1.1 Batas Administrasi dan kondisi Geografi

Propinsi Riau terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan luas 87023.66 Km². Keberadaanya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka yang terletak antara 01⁰ 05' 00" Lintang Selatan 02⁰ 25' 00" Lintang Utara atau antara 100⁰ 00'-105⁰ 05' 00" Bujur Timur. Di daratan terdapat 15 sungai diantaranya 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung yakni Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas wilayah Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan : Propinsi Jambi dan Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Gambar 4.1

Peta Administrasi Provinsi Riau



Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kuantan Singingi	15	229
Indragiri Hulu	14	194
Indragiri Hilir	20	236
Pelalawan	12	118
Siak	14	131
Kampar	21	250
Rokan Hulu	16	148
Bengkalis	8	155
Rokan Hilir	18	194
Kepulauan Meranti	9	101
Pekanbaru	12	58
Dumai	7	33
Riau	166	1847

Sumber: BPS Provinsi Riau (2016).

Secara administrative Provinsi Riau terdiri atas 12 kabupaten/kota dengan 166 kecamatan dan 1847 desa/kelurahan. Kecamatan dan desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kabupaten Pelalwan merupakan wilayah terbesar di Provinsi Riau dengan luas wilayah mencapai 12758.45 KM2 sedangkan Kota Pekanbaru merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayah 632.27 KM2.

Tabel 4.2

Luas Wilayah Provinsi Riau (KM2) Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Provinsi Riau (KM2)
Kuantan Singingi	5259.36
Indragiri Hulu	7723.8
Indragiri Hilir	12614.78
Pelalawan	12758.45
Siak	8275.18
Kampar	10983.47
Rokan Hulu	7588.13
Bengkalis	6975.41
Rokan Hilir	8881.59
Kepulauan Meranti	3707.84
Pekanbaru	632.27
Dumai	1623.38
RIAU	87023.66

Sumber: BPS Provinsi Riau (2016).

IV. 1.2 Aspek Demografi

IV. 1.2.1 Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kebijakan pemerintah

dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong kegiatan seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan kampanye program Keluarga Berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	294468	302631	306718	310619	314276	317935
Indragiri Hulu	372074	383814	392354	400901	409431	417733
Indragiri Hilir	675898	676419	685530	694614	703734	713034
Pelalawan	329539	339869	358210	377221	396990	417498
Siak	391760	404093	416298	428499	440841	453052
Kampar	711236	733506	753376	773171	793005	812702
Rokan Hulu	507079	523024	545483	568576	592278	616466
Bengkalis	503604	519389	527918	536138	543987	551683
Rokan Hilir	574419	592403	609779	627233	644680	662242
Kepulauan Meranti	177004	177587	178839	179894	181095	182152
Pekanbaru	929247	958352	984674	1011467	1038118	1064566
Dumai	259913	268022	274089	280109	285967	291908
RIAU	5726241	5879109	6033268	6188442	6344402	6500971

Sumber: BPS Provinsi Riau (2016).

Jumlah penduduk Provinsi Riau di tahun 2011 sebanyak 5.726.241 jiwa yang sebagian besar terpusat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 929.247 jiwa sementara Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak 177.004 jiwa. Di tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi Riau

meningkat menjadi 6.500.971 jiwa yang sebagian besar terpusat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.064.566 orang sementara Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak 182.152 jiwa. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 3.336.874 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 3.164.097 orang.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Kuantan Singingi	163 213	154 722	317 935	105,49
Indragiri Hulu	214 402	203 331	417 733	105,44
Indragiri Hilir	366 043	346 991	713 034	105,49
Pelalawan	214 268	203 230	417 498	105,43
Siak	232 553	220 499	453 052	105,47
Kampar	417 085	395 617	812 702	105,43
Rokan Hulu	316 506	299 960	616 466	105,52
Bengkalis	283 225	268 458	551 683	105,50
Rokan Hilir	339 900	322 342	662 242	105,45
Kep.Meranti	93 488	88 664	182 152	105,44
Pekanbaru	546 400	518 166	1 046 566	105,45
Dumai	149 791	142 117	291 908	105,40
RIAU	3 336 874	3 164 097	6 500 971	105,46

Sumber: BPS Provinsi Riau (2016).

IV. 1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM Provinsi Riau

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Riau.

Tabel 4.5

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	IPM							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	65.07	65.72	66.31	66.65	67.47	68.32	68.66	69.53
Indragiri Hulu	65.1	65.93	66.5	66.68	67.11	68	68.67	68.97
Indragiri Hilir	61.98	62.82	63.04	63.44	63.8	64.8	65.35	66.17
Pelalawan	65.95	66.58	67.25	68.29	68.67	69.82	70.21	70.59
Siak	69.78	70.2	70.45	70.84	71.45	72.17	72.7	73.18
Kampar	68.62	69.64	70.08	70.46	70.72	71.28	71.39	72.19
Rokan Hulu	63.59	64.2	64.99	66.07	67.02	67.29	67.86	68.67
Bengkalis	69.29	69.72	70.26	70.6	70.84	71.29	71.98	72.27
Rokan Hilir	64.13	64.76	65.09	65.46	66.22	66.81	67.52	67.84
Kepulauan Meranti	59.71	60.38	61.49	62.53	62.91	63.25	63.9	64.7
Pekanbaru	77.34	77.71	77.94	78.16	78.42	79.32	79.69	79.97
Dumai	69.55	70.43	71.07	71.59	71.86	72.2	72.96	73.46
Riau	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79

Sumber: BPS Provinsi Riau (2017).

Angka IPM Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 68.65 yang kemudian naik secara berkala hingga pada tahun 2017 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 71.79. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota peringkat IPM Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar 79.97 dan selalu menempati posisi teratas atau

nilainya terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

IV. 1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Provinsi Riau selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Garis kemiskinan Provinsi Riau tercatat sebesar 350.129 dan meningkat tajam menjadi 456.493 2017 di tahun 2017.

Tabel 4.6

Garis Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	400655	422691	441315	468199	497747
Indragiri Hulu	369210	387172	396088	419737	432598
Indragiri Hilir	282361	289780	295781	315988	368134
Pelalawan	429452	438949	451528	473240	487648
Siak	336671	351610	363879	391039	414501
Kampar	336681	348373	360324	375716	398138
Rokan Hulu	358295	370540	384226	420884	446901
Bengkalis	388671	405945	420733	455021	496657
Rokan Hilir	296770	308248	317220	345953	367338
Kepulauan Meranti	386745	397937	403535	427938	445025
Pekanbaru	381287	399451	416479	435082	473788
Dumai	328158	341525	353079	369624	403244
Riau	350129	379223	399211	426001	456493

Sumber: BPS Provinsi Riau (2017).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2013 sebesar 511.47 atau 10.01%, turun menjadi 498.28 di tahun 2014, kembali naik di tahun 2015 menjadi 531.39 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 515.4 dan 514.62 atau setara dengan 7.78% dari total penduduk Riau.

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau 2013-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	34.71	33.52	34.1	31.22	31.95
Indragiri Hulu	29.6	29.4	31.63	29.73	26.42
Indragiri Hilir	54.18	52.39	56.85	56.82	55.4
Pelalawan	43.55	42.67	47.53	45.35	44.4
Siak	23.21	22.54	24.81	24.86	26.83
Kampar	68.58	67.61	72.22	67.68	66.33
Rokan Hulu	59.85	58.29	64.74	67.42	69.24
Bengkalis	40.11	38.82	40	37.49	38.19
Rokan Hilir	47.47	46.07	49.13	52.4	53.19
Kepulauan Meranti	64.02	61.07	61.64	56.18	53.05
Pekanbaru	32.46	32.29	33.76	32.49	33.09
Dumai	13.72	13.62	14.97	13.76	13.53
Riau	511.47	498.28	531.39	515.4	514.62

Sumber: BPS Provinsi Riau (2017).

IV. 1.4 Aspek Pelayanan Umum

IV. 1.4.1 Urusan Pendidikan

Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jumlah sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terus mengalami peningkatan pada setiap level pendidikan mulai dari tahun ajaran 2009/2010 hingga 2013/2014. Jenis sekolah terbanyak di Provinsi Riau adalah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 3.111 pada tahun ajaran 2009/2010 dan 3.644 pada tahun ajaran 2013/2014 sementara jenis sekolah paling sedikit yakni SMK sebanyak 159 di tahun 2009/2010 dan 195 di tahun 2013/2014.

Tabel 4.8

**Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dalam Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Riau**

Jenis Sekolah	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
TK	1.389	1.472	1.499	1.720	1.951
SD	3.111	3.392	3.394	3.418	3.644
SLTP	853	868	946	966	997
SMU	321	349	327	358	358
SMK	159	176	194	195	195

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2014).

Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersifat fluktuatif. Jumlah guru terbanyak yakni pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 41.849 di tahun ajaran 2009/2010 dan 53.306 di tahun ajaran 2013/2014, sementara jumlah guru paling sedikit yakni pada tingkatan SMK dengan jumlah 4.454 di tahun ajaran 2009/2010 dan 5.130 di tahun ajaran 2013/2014.

Tabel 4.9

Jumlah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Menurut Jenis Sekolah

Jenis Sekolah	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
TK	5.320	7.886	6.385	5.047	6.539
SD	41.849	52.523	46.767	41.831	53.306
SLTP	12.836	19.013	19.606	14.959	23.634
SMU	9.188	9.957	13.692	9.395	9.058
SMK	4.454	5.079	4.774	5.240	5.130

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2014).

IV. 1.4.2 Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluargaji. Jumlah sarana kesehatan yang ada di Provinsi Riau tahun 2015 yakni rumah sakit sebanyak 67 unit, 212 unit Puskesmas, 981 unit Puskesmas Pembantu dan 185 unit Puskesmas Keliling. Jumlah rumah sakit terbanyak ada di Kota Pekanbaru dengan total 27 unit, puskesmas dan Puskesmas Pembantu terbanyak ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 31 dan 185 unit sedangkan Puskesmas Keliling terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 26 unit.

Tabel 4.10**Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
Kuantan Singingi	1	23	60	17
Indragiri Hulu	3	18	130	21
Indragiri Hilir	4	25	170	9
Pelalawan	4	12	36	18
Siak	1	15	92	15
Kampar	6	31	185	24
Rokan Hulu	6	21	89	26
Bengkalis	7	11	54	10
Rokan Hilir	4	17	77	8
Kepulauan Meranti	1	9	41	0
Pekanbaru	27	20	34	20
Dumai	3	10	13	17
Jumlah	67	212	981	185

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau (2015).

Jumlah dokter terbanyak di Provinsi Riau yakni dokter umum dengan angka 1.209 orang, disusul dengan dokter spesialis sebanyak 854 dan dokter gigi sebanyak 375 orang. Selanjutnya jumlah perawat umum yang ada sebanyak 7.161 orang dan bidan sebanyak 4.948 orang. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak ada di Kota Pekanbaru sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 4.11**Jumlah Dokter, Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	Dokter			Perawat Umum	Bidan
	Spesialis	Umum	Gigi		
Kuantan Singingi	14	56	20	357	448
Indragiri Hulu	12	65	26	471	625
Indragiri Hilir	15	79	21	449	234
Pelalawan	36	92	25	417	443
Siak	20	78	25	509	367
Kampar	29	80	44	710	788
Rokan Hulu	26	65	24	400	409
Bengkalis	72	101	43	604	325
Rokan Hilir	12	122	26	730	503
Kepulauan Meranti	12	53	12	206	197
Pekanbaru	584	334	89	1 885	308
Dumai	22	84	20	423	301
Total	854	1.209	375	7.161	4.948

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau (2015).

IV. 1.4.3 Urusan Sosial

Jumlah panti sosial yang dimiliki pemerintah di Provinsi Riau tahun 2011-2013 berjumlah 5 unit dengan kapasitas 375 yang dihuni oleh 240-271 orang. Di tahun 2014-2015 jumlah panti sosial milik pemerintah mengalami penurunan menjadi 3 unit dengan kapasitas 240 dan dihuni oleh 210 orang, sedangkan jumlah panti sosial yang dimiliki swasta tahun 2011 sebanyak 76 unit dengan kapasitas 4.240 yang dihuni oleh 3.264 orang. Di tahun 2012 terjadi penambahan jumlah menjadi 77 unit namun kapasitas yang dimiliki justru berkurang menjadi 3.755 dan dihuni oleh 3.469 orang, kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah panti sosial menjadi 74 unit dengan kapasitas 3.359 yang dihuni oleh

3.359 orang dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014-2015 menjadi 57 unit dengan kapasitas 3.830 dan diuni oleh 1.760 orang.

Tabel 4.12

**Jumlah Panti Sosial Pemerintah dan Swasta di Provinsi Riau
Tahun 2013-2015**

Tahun	Pemerintah			Swasta		
	Jumlah	Kapasitas	Penghuni	Jumlah	Kapasitas	Penghuni
2015	3	240	210	57	3.830	1.760
2014	3	240	210	57	3.830	1.760
2013	5	375	270	74	3.359	3.359
2012	5	375	271	77	3.755	3.469
2011	5	375	240	76	4.240	3.264

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2015).

VI. 2 Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau didirikan pada hari Sabtu tanggal 1 Rabiul Akhir 1390 H atau bertepatan dengan 6 Juni 1970 M di Kota Pekanbaru dan diresmikan oleh Gubernur Riau Brigadir Jenderal Arifin Achmad pada tanggal 9 September 1970 dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu Riau melalui keputusan Musyawarah Besar Lembaga Adat Daerah Riau No. 07/Mubes-LADR/1994 tanggal 9 Februari 1994.

Pendirian Lembaga Adat Melayu Riau diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau dibentuk dengan pertimbangan perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang

berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau. Batang terendam itu ialah jatidiri/identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an.

IV.2.1 Visi

Visi dari Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebagai berikut:
Terwujudnya masyarakat adat berbudaya Melayu yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Lembaga Adat Melayu Riau tersebut diatas, disusun misi sebagai berikut:

1. Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
2. Melindungi, memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.

IV.2.3 Tujuan

Lembaga Adat Melayu Riau memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menggali, membina, memelihara, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai luhur adat dan budaya Melayu Riau sebagai landasan memperkuat dan mengekalkan jati diri masyarakat Melayu Riau.
2. Mewujudkan masyarakat adat yang berbudaya Melayu, maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memelihara dan membela hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

IV.2.4 Tugas Pokok

Tugas pokok Lembaga Adat Melayu Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau adalah:

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
2. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke-Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV.2.5 Fungsi

Lembaga Adat Melayu Riau memiliki fungsi yaitu:

1. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu.
2. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau.
4. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
5. Sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.